

**Nama : Indri Mutiara**

**NPM: 2523031001**

**Magister Pendidikan IPS**

## **UTS STUDI SOSIAL EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN**

1. Sebuah daerah pesisir di Indonesia mengalami penurunan hasil tangkapan ikan selama 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh overfishing, perubahan iklim, dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Dampaknya, pendapatan nelayan menurun drastis, angka kemiskinan meningkat, dan terjadi migrasi tenaga kerja ke kota. Pemerintah daerah telah mencoba memberikan bantuan subsidi, namun belum menunjukkan hasil signifikan. Pertanyaan 1. Analisislah akar permasalahan ekonomi yang terjadi dengan menggunakan pendekatan multidisipliner (ekonomi, sosial, dan lingkungan). 2. Evaluasi kebijakan pemerintah yang telah dilakukan. 3. Rancanglah solusi inovatif berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. 4. Jelaskan bagaimana peran pendidikan IPS dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut.

### **Jawab:**

- a. Analisis Akar Permasalahan (Pendekatan Multidisipliner)

Permasalahan penurunan hasil tangkapan ikan di wilayah pesisir tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan harus dianalisis melalui pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terintegrasi. Dari perspektif ekonomi, fenomena ini menunjukkan adanya *resource overexploitation* atau eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perikanan. Overfishing menyebabkan stok ikan menurun drastis sehingga produktivitas nelayan ikut turun. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan *diminishing returns*, di mana usaha yang dikeluarkan semakin besar tetapi hasil yang diperoleh semakin kecil. Selain itu, ketergantungan nelayan terhadap tengkulak dan fluktuasi harga pasar memperparah kondisi ekonomi mereka, sehingga menciptakan *poverty trap* yang sulit diputus (Novakarti & Fatoni, 2025). Keterbatasan akses terhadap teknologi modern dan modal juga menjadi faktor yang menghambat efisiensi produksi (Obie, 2024).

Dari aspek lingkungan, penyebab utama terletak pada degradasi ekosistem laut akibat praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan alat tangkap destruktif dan eksploitasi berlebihan. Overfishing tidak hanya mengurangi jumlah ikan, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem laut, sehingga proses regenerasi sumber daya menjadi terganggu. Selain itu, perubahan iklim memperburuk kondisi melalui peningkatan suhu laut, perubahan arus, dan penurunan kualitas habitat ikan. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi overfishing dan perubahan lingkungan menjadi faktor utama penurunan produktivitas sektor perikanan (Subianto et al., 2023). Sementara itu, dari perspektif sosial, masyarakat nelayan sering kali berada dalam kondisi marginal dengan tingkat pendidikan rendah, akses terbatas terhadap informasi, serta ketergantungan pada jaringan patron-klien. Struktur sosial seperti ini membuat nelayan sulit keluar dari kemiskinan karena posisi tawar mereka lemah dalam rantai ekonomi (McWilliam et al., 2021). Selain itu, konflik sosial, ketimpangan akses sumber daya, serta kurangnya diversifikasi mata pencaharian memperparah kondisi. Dampaknya adalah meningkatnya kemiskinan dan migrasi tenaga kerja ke kota sebagai strategi bertahan hidup, yang justru menimbulkan masalah sosial baru seperti urbanisasi tidak terencana.

Dengan demikian, akar permasalahan ini bersifat sistemik dan saling terkait: eksploitasi ekonomi yang tidak berkelanjutan, degradasi lingkungan, serta struktur sosial yang tidak mendukung kesejahteraan nelayan.

#### b. Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah berupa pemberian subsidi kepada nelayan pada dasarnya merupakan langkah yang bersifat *short-term relief* atau bantuan jangka pendek. Subsidi dapat membantu mengurangi beban biaya operasional seperti bahan bakar atau alat tangkap, namun tidak menyentuh akar permasalahan yang lebih struktural. Dalam banyak kasus, subsidi justru berpotensi memperparah overfishing karena meningkatkan kapasitas penangkapan tanpa diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan tersebut cenderung bersifat *top-down* dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat nelayan. Akibatnya, program yang dijalankan sering tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perikanan yang tidak adaptif dan kurang berpihak pada nelayan kecil justru memperkuat ketimpangan dan memperburuk kondisi ekonomi mereka (Obie, 2024). Di sisi lain, lemahnya penegakan

hukum terhadap praktik penangkapan ilegal dan penggunaan alat tangkap destruktif juga menjadi faktor kegagalan kebijakan (Roisah et al., 2023).

Dengan demikian, kebijakan yang ada belum efektif karena:

- Bersifat jangka pendek dan tidak struktural
  - Tidak menyoar aspek lingkungan dan sosial secara komprehensif
  - Kurangnya partisipasi masyarakat
  - Lemahnya pengawasan dan regulasi
- c. Solusi yang ditawarkan harus bersifat integratif dan berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama (*community-based approach*). Salah satu strategi utama adalah pengembangan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*) melalui pengaturan kuota tangkap, penggunaan alat ramah lingkungan, serta pembentukan kawasan konservasi laut berbasis masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan stok ikan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.
- Selain itu, perlu dilakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan nelayan pada sektor tangkap. Misalnya melalui pengembangan:
- d. Budidaya perikanan (*aquaculture*)
  - e. Ekowisata pesisir
  - f. Pengolahan hasil laut bernilai tambah

Diversifikasi ini terbukti mampu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dan mengurangi tekanan terhadap sumber daya laut (Subianto et al., 2023).

Strategi lain adalah penguatan kelembagaan lokal, seperti koperasi nelayan, untuk meningkatkan posisi tawar dalam rantai pasar dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Selain itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknologi, literasi keuangan, dan akses pasar digital menjadi faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan berbasis pemberdayaan juga harus mengintegrasikan kearifan lokal, karena banyak komunitas pesisir memiliki sistem pengelolaan sumber daya tradisional yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam program pemberdayaan dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan nelayan (Obie, 2024).

#### d. Peran Pendidikan IPS dalam Penyelesaian Masalah

Pendidikan IPS memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran dan kompetensi siswa dalam menghadapi permasalahan sosial-ekonomi dan lingkungan. Dalam konteks ini, IPS dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan kesadaran kritis (*critical awareness*) terhadap isu keberlanjutan. Melalui pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), siswa dapat diajak menganalisis kasus nyata seperti *overfishing*, perubahan iklim, dan kemiskinan nelayan.

Selain itu, IPS juga dapat mengintegrasikan konsep *Education for Sustainable Development* (ESD) dengan menekankan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga dilibatkan dalam proyek nyata seperti kampanye lingkungan, penelitian lokal, atau pengembangan solusi berbasis komunitas. Lebih jauh, pendidikan IPS dapat memperkuat nilai-nilai:

- Tanggung jawab sosial
- Kepedulian lingkungan
- Kewirausahaan sosial

Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di masyarakatnya. IPS tidak lagi hanya menjadi mata pelajaran hafalan, tetapi menjadi alat transformasi sosial yang relevan dengan tantangan global saat ini.

2. Dinamika ekonomi mutakhir seperti perkembangan ekonomi digital dewasa ini, sejatinya, membuka peluang peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam dunia kerja melalui wirausaha digital. Wirausaha perempuan dapat memanfaatkan transformasi digital baik sebagai kreator maupun penerima manfaat (*beneficiary*). Kewirausahaan (*entrepreneurship*) digital perempuan menawarkan fleksibilitas antara pekerjaan dan urusan rumah tangga. Perempuan menjadi wirausaha juga acap dinilai sebagai solusi dari diskriminasi dan ketidakpuasan kaum perempuan terhadap dunia kerja reguler (Heilman dan Chen, 2003). Selain itu, peluang laki-laki dan perempuan setara dalam digital entrepreneurship. Namun, berbagai kendala sosial, normatif, dan tingkat pendidikan ditengarai menjadi batu sandungan bagi keterlibatan lebih besar kaum perempuan dalam wirausaha digital termasuk aktivitas jual beli secara elektronik (*e-commerce*). Sebagai contoh, jumlah wanita tercatat lebih dari 52% dari populasi Eropa tetapi hanya 34,4% dari para wirausaha di Uni Eropa yang berjenis kelamin perempuan. Faktanya, kesenjangan ini justru meningkat dengan digitalisasi ekonomi. Menurut laporan Komisi Uni Eropa, ketimpangan meningkat terlihat

dari jumlah perempuan yang kurang terwakili di semua sektor ekonomi digital. Persentase laki-laki bekerja di industri digital tiga kali lebih besar dibanding perempuan. Jumlah perempuan hanya mencapai 21,5% dari seluruh pekerja ekonomi digital pada tahun 2015.

Sumber: <https://analisis.kontan.co.id/news/potensi-wirusaha-digital-perempuan>

Berdasarkan kutipan berita di atas: 1) Berikan pandangan-pandangan Anda tentang ekonomi di era digital? 2) Bagaimana pendapat Anda tentang potensi kewirausahaan dan partisipasi wanita dalam perkembangan dunia usaha dan industry? 3) Bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam mensikapi ketimpangan persentase laki-laki bekerja di industry 3x lebih besar dibandingkan dengan perempuan? Berikan analisis Anda!

**Jawab:**

a. Ekonomi di era digital merupakan transformasi struktural yang mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa secara fundamental. Perkembangan teknologi informasi, internet, dan platform digital telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang lebih terbuka, fleksibel, dan berbasis inovasi. Dalam konteks ini, ekonomi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi melalui *e-commerce*, tetapi juga memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, termasuk kelompok yang sebelumnya terpinggirkan seperti perempuan dan pelaku usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi digital memiliki potensi sebagai alat inklusi ekonomi (*inclusive growth*), karena mampu menurunkan hambatan masuk ke pasar (*entry barriers*) seperti kebutuhan modal besar, lokasi fisik, dan jaringan distribusi tradisional (Bukht & Heeks, 2017).

Namun, di balik peluang tersebut, ekonomi digital juga menghadirkan tantangan baru yang tidak bisa diabaikan. Salah satu isu utama adalah kesenjangan digital (*digital divide*), baik dari segi akses teknologi, literasi digital, maupun keterampilan. Tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi digital, sehingga potensi ekonomi digital tidak terdistribusi secara merata. Selain itu, ekonomi digital cenderung menciptakan *winner-takes-all market*, di mana platform besar mendominasi pasar dan pelaku usaha kecil sulit bersaing. Dalam konteks gender, kesenjangan ini menjadi lebih kompleks karena perempuan sering kali menghadapi hambatan tambahan seperti norma sosial, beban domestik, dan keterbatasan akses pendidikan (UN Women, 2021).

Dengan demikian, ekonomi digital dapat dipahami sebagai fenomena yang ambivalen: di satu sisi membuka peluang inklusi ekonomi yang luas, tetapi di sisi lain berpotensi memperkuat ketimpangan struktural jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat.

Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan bukan hanya mendorong digitalisasi, tetapi juga memastikan bahwa transformasi digital bersifat adil, inklusif, dan berkelanjutan.

- b. Kewirausahaan digital menawarkan peluang besar bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasi ekonomi mereka. Salah satu keunggulan utama dari kewirausahaan digital adalah fleksibilitas, yang memungkinkan perempuan untuk mengelola usaha tanpa harus meninggalkan peran domestik sepenuhnya. Dalam banyak kasus, platform digital seperti marketplace dan media sosial memungkinkan perempuan untuk menjalankan bisnis dari rumah, sehingga mengurangi hambatan struktural yang selama ini membatasi partisipasi mereka di sektor formal (Nambisan, 2017).

Selain itu, kewirausahaan digital juga dapat menjadi sarana pemberdayaan perempuan, baik secara ekonomi maupun sosial. Perempuan yang terlibat dalam aktivitas wirausaha cenderung memiliki kemandirian finansial yang lebih tinggi, serta posisi tawar yang lebih kuat dalam keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, kewirausahaan tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial yang mampu mengurangi ketimpangan gender (Heilman & Chen, 2003).

Namun demikian, potensi ini belum sepenuhnya terealisasi. Data yang menunjukkan rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor digital, baik sebagai pekerja maupun wirausaha, mengindikasikan adanya hambatan struktural yang signifikan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan akses terhadap teknologi dan modal, serta norma sosial yang masih membatasi peran perempuan dalam dunia kerja. Selain itu, adanya bias gender dalam sektor teknologi juga menjadi faktor yang menghambat partisipasi perempuan, misalnya stereotip bahwa pekerjaan di bidang teknologi lebih cocok untuk laki-laki (OECD, 2022). Dengan demikian, meskipun peluang kewirausahaan digital bagi perempuan sangat besar, realisasinya sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Tanpa intervensi yang tepat, ekonomi digital justru berpotensi memperlebar kesenjangan gender yang sudah ada.

- c. Ketimpangan gender dalam industri digital, di mana partisipasi laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, menunjukkan adanya kegagalan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif. Peran pemerintah dalam hal ini sangat krusial, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator perubahan sosial.

Pertama, pemerintah perlu meningkatkan akses dan literasi digital bagi perempuan melalui program pelatihan yang inklusif dan berbasis kebutuhan. Pelatihan ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga literasi kewirausahaan, manajemen bisnis, dan pemasaran digital. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital secara signifikan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi digital (UN Women, 2021).

Kedua, pemerintah harus menyediakan dukungan finansial dan akses modal bagi perempuan, misalnya melalui kredit usaha mikro, subsidi, atau program inkubasi bisnis. Banyak perempuan yang memiliki potensi kewirausahaan, tetapi terhambat oleh keterbatasan modal. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan yang responsif gender menjadi sangat penting.

Ketiga, diperlukan regulasi yang mendukung kesetaraan gender di sektor digital, termasuk kebijakan anti-diskriminasi dan afirmasi bagi perempuan dalam industri teknologi. Pemerintah juga dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan inklusif, seperti fleksibilitas kerja dan lingkungan kerja yang ramah gender.

Keempat, perubahan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kampanye sosial untuk mengubah norma dan stereotip gender yang menghambat partisipasi perempuan. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran sejak dini tentang pentingnya kesetaraan gender dalam dunia kerja.

Terakhir, pemerintah perlu mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif. Transformasi digital tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan sistemik yang melibatkan berbagai aktor.

Secara keseluruhan, ketimpangan gender dalam ekonomi digital bukan hanya persoalan individu, tetapi merupakan hasil dari struktur sosial dan ekonomi yang tidak setara. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan juga harus bersifat struktural dan berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, ekonomi digital dapat menjadi peluang besar untuk mewujudkan kesetaraan gender, bukan justru memperdalam ketimpangan.

Ekonomi digital membuka peluang besar bagi peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja melalui kewirausahaan digital. Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya terealisasi karena adanya berbagai hambatan struktural, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif melalui peningkatan literasi digital, akses modal, regulasi

yang adil, serta perubahan norma sosial. Dengan pendekatan yang komprehensif, ekonomi digital dapat menjadi alat transformasi menuju kesetaraan gender dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Jelaskan keterkaitan ekonomi dalam konteks pembelajaran IPS? Bagaimanakah seharusnya pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan didesain dan diterapkan di persekolahan dalam upaya mengembangkan skills dan jiwa entrepreneur, sertakan contohnya.

**Jawab:**

Dalam konteks pembelajaran IPS, ekonomi merupakan salah satu pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dari disiplin ilmu sosial lainnya seperti geografi, sosiologi, dan sejarah. IPS pada hakikatnya mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi menjadi bagian integral dari dinamika sosial tersebut. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, pembelajaran ekonomi dalam IPS tidak hanya berorientasi pada konsep teoritis, tetapi juga pada pemahaman kontekstual tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai kondisi sosial (Hasibuan, 2023).

Lebih jauh, keterkaitan ekonomi dalam IPS juga terlihat pada integrasi isu-isu global seperti globalisasi, ekonomi digital, dan pembangunan berkelanjutan. Pembelajaran IPS berperan dalam membekali siswa dengan kemampuan memahami sistem ekonomi mikro dan makro serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pendidikan global dalam IPS bahkan terbukti mampu mendorong kewirausahaan, inovasi, serta kesiapan siswa menghadapi tantangan ekonomi modern (Adriyan et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi dalam IPS tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga transformatif, yaitu membentuk cara berpikir kritis siswa terhadap realitas sosial-ekonomi.

Selain itu, ekonomi dalam IPS juga memiliki peran penting dalam membangun literasi finansial siswa sejak dini. Pembelajaran yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan ekonomi, serta perilaku konsumsi yang bijak (Meilisa et al., 2023). Dengan demikian, keterkaitan ekonomi dalam IPS tidak hanya sebatas materi pelajaran, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kompetensi hidup (*life skills*) yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21.

Agar pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan mampu mengembangkan keterampilan dan jiwa entrepreneur siswa, maka desain pembelajaran harus bergeser dari pendekatan konvensional (hafalan) menuju pendekatan yang kontekstual, aktif, dan berbasis pengalaman (*experiential learning*). Pembelajaran tidak cukup hanya menjelaskan konsep ekonomi, tetapi harus memberikan ruang bagi siswa untuk mengalami langsung proses ekonomi tersebut.

Salah satu pendekatan yang efektif adalah project-based learning (PjBL). Dalam pendekatan ini, siswa diberikan proyek nyata yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti membuat usaha kecil, melakukan riset pasar sederhana, atau mengelola keuangan usaha. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran IPS yang berbasis proyek dan kontekstual memiliki pengaruh signifikan terhadap kreativitas, inovasi, keberanian mengambil risiko, serta keterampilan komunikasi siswa yang semuanya merupakan karakter utama seorang entrepreneur (Bahri & Herliana, 2025).

Selain itu, pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan perlu mengintegrasikan pendekatan problem-based learning (PBL), di mana siswa diajak untuk menganalisis masalah ekonomi nyata, seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketimpangan ekonomi. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengambil keputusan, dan merumuskan solusi inovatif. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

Desain pembelajaran juga harus memperhatikan integrasi teknologi digital, mengingat perkembangan ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh digitalisasi. Siswa perlu dikenalkan pada konsep *digital entrepreneurship*, seperti pemasaran online, penggunaan media sosial untuk bisnis, serta platform e-commerce. Hal ini penting agar siswa memiliki kesiapan menghadapi dunia kerja dan bisnis di era digital.

Dalam implementasinya, pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan harus berorientasi pada pengembangan keterampilan abad 21 (*21st century skills*), seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Selain itu, pembelajaran juga harus menanamkan nilai-nilai kewirausahaan seperti kemandirian, inovasi, keberanian mengambil risiko, dan tanggung jawab.

Salah satu model implementasi yang dapat dilakukan adalah melalui simulasi bisnis di kelas. Misalnya, siswa dibagi ke dalam kelompok dan diminta untuk membuat usaha sederhana seperti menjual makanan ringan atau produk kerajinan. Mereka harus merancang produk, menentukan harga, melakukan promosi, serta menghitung keuntungan dan kerugian.

Kegiatan ini tidak hanya melatih keterampilan ekonomi, tetapi juga kemampuan manajerial dan kerja sama tim.

Contoh lain adalah proyek kewirausahaan berbasis lingkungan (*green entrepreneurship*), di mana siswa diajak untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan, seperti daur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya mengembangkan jiwa wirausaha, tetapi juga menanamkan kesadaran lingkungan dan keberlanjutan (Indah et al., 2023).

Selain itu, sekolah juga dapat mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan, seperti bazar sekolah, koperasi siswa, atau inkubator bisnis kecil. Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar secara langsung tentang dunia usaha dalam lingkungan yang lebih fleksibel dan praktis.

Ekonomi dalam pembelajaran IPS memiliki keterkaitan yang sangat erat karena menjadi dasar dalam memahami kehidupan sosial masyarakat. Pembelajaran ekonomi tidak hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk keterampilan hidup, literasi finansial, dan kesadaran sosial siswa. Oleh karena itu, pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan harus didesain secara kontekstual, berbasis proyek, dan berorientasi pada pengalaman nyata agar mampu mengembangkan skills dan jiwa entrepreneur siswa. Dengan pendekatan yang tepat, IPS dapat menjadi sarana strategis dalam mencetak generasi yang kreatif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

4. Memiliki pekerjaan tidaklah menjamin kemampuan untuk keluar dari cengkeraman kemiskinan. Kekurangan peluang kerja yang layak secara terus menerus, investasi yang tidak memadai dan rendahnya konsumsi mengarah pada erosi kontrak sosial mendasar yang menjadi landasan masyarakat demokratis: Semua kemajuan harus dibagi bersama. Menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Ini merupakan lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia kerja di seluruh dunia yang mencapai sekitar 40 juta per tahunnya, diperkirakan lebih dari 600 juta pekerjaan baru perlu diciptakan hingga tahun 2030. Kondisi sekitar 780 juta pekerja perempuan dan laki-laki dengan penghasilan kurang dari dua dolar per hari dan tidak memadai untuk mengangkat diri dan keluarga mereka keluar dari kemiskinan, juga perlu ditingkatkan. Di tingkat internasional, Indonesia telah membuat komitmen yang sangat kuat

untuk mewujudkan pekerjaan layak dan memainkan peranan penting guna memastikan bahwa persoalan ketenagakerjaan dan tenaga kerja dimasukkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Pentingnya kerja layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan disoroti oleh Tujuan 8 yang bertujuan untuk “mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua”. Pemerintah Indonesia akan mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai badan koordinator untuk penerapan <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>

Berdasarkan kutipan artikel tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut: a. Berikan analisis Anda tentang keterkaitan pertumbuhan penduduk, ekonomi dan kesejahteraan! b. Mengapa perlu keseimbangan pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, dan lingkungan? c. Bagaimana mewujudkan SDM Unggul melalui pendidikan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan? d. Berikan contoh nyata keberlanjutan ekonomi dan pembangunan manusia di wilayah Anda!

**Jawab:**

a. Keterkaitan antara pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan kesejahteraan bersifat kompleks dan dinamis. Secara teoritis, pertumbuhan penduduk usia kerja dapat menjadi bonus demografi yang mendorong pertumbuhan ekonomi apabila diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang produktif. Tenaga kerja yang besar berpotensi meningkatkan output ekonomi, memperluas pasar konsumsi, serta mempercepat inovasi. Namun, apabila pertumbuhan penduduk tidak diiringi dengan ketersediaan pekerjaan layak, maka kondisi tersebut justru dapat menimbulkan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa pekerjaan tidak selalu menjamin kesejahteraan, terutama jika pekerjaan tersebut bersifat informal, berupah rendah, dan tidak memiliki perlindungan sosial (ILO, 2022).

Fenomena “*working poor*” atau pekerja miskin menjadi bukti nyata bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan. Sekitar ratusan juta pekerja di dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan meskipun mereka bekerja. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi hasil pembangunan ekonomi. Selain itu, rendahnya investasi dan produktivitas juga menyebabkan terbatasnya penciptaan lapangan kerja berkualitas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif cenderung memperbesar kesenjangan pendapatan dan memperlemah mobilitas sosial (World Bank, 2023).

Dengan demikian, keterkaitan antara ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: pertumbuhan penduduk menyediakan tenaga kerja, ekonomi menyediakan peluang kerja dan pendapatan, sedangkan kesejahteraan merupakan hasil dari distribusi yang adil dan kualitas pekerjaan yang tersedia. Tanpa kebijakan yang tepat, pertumbuhan penduduk justru dapat menjadi beban ekonomi, bukan peluang.

- b. Pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek manusia dan lingkungan cenderung menghasilkan dampak negatif jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, dan keberlanjutan lingkungan sebagai tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pertama, pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan pendapatan dan produktivitas, tetapi tanpa pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, keterampilan), pertumbuhan tersebut tidak akan berkelanjutan. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Kedua, pembangunan yang mengabaikan lingkungan akan menyebabkan degradasi sumber daya alam, seperti pencemaran, perubahan iklim, dan krisis ekologi, yang pada akhirnya justru merugikan ekonomi itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya yang berlebihan dapat menurunkan produktivitas jangka panjang dan meningkatkan kerentanan masyarakat (UNDP, 2022).

Konsep ini sejalan dengan Tujuan 8 SDGs yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keseimbangan ini penting karena ketiga aspek tersebut saling bergantung: ekonomi membutuhkan lingkungan sebagai sumber daya, manusia sebagai pelaku, dan kesejahteraan sebagai tujuan akhir. Tanpa keseimbangan, pembangunan akan bersifat eksploitatif dan tidak berkelanjutan.

- c. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul merupakan kunci utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kompetensi, keterampilan, dan karakter individu yang mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Untuk mewujudkan SDM unggul, pendidikan harus berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital.

Selain itu, pendidikan juga perlu mengintegrasikan konsep Education for Sustainable Development (ESD), yang menekankan pemahaman tentang keterkaitan antara

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya dipersiapkan untuk bekerja, tetapi juga menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi ESD dalam kurikulum dapat meningkatkan kesadaran lingkungan, kemampuan berpikir sistemik, serta kesiapan menghadapi tantangan global (UNESCO, 2023).

Di sisi lain, pembangunan ekonomi berkelanjutan harus menciptakan lapangan kerja yang layak (*decent work*), meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi. Pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung pengembangan SDM, seperti pelatihan vokasi, inkubasi bisnis, dan penguatan kewirausahaan. Dengan demikian, pendidikan dan ekonomi saling melengkapi dalam menciptakan SDM unggul yang tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif dan berdaya saing tinggi.

- d. Di wilayah Lampung, terdapat beberapa contoh nyata yang mencerminkan upaya keberlanjutan ekonomi dan pembangunan manusia. Salah satunya adalah pengembangan UMKM berbasis pertanian dan perikanan yang memanfaatkan potensi lokal. Misalnya, pengolahan hasil laut menjadi produk bernilai tambah seperti ikan olahan, kerupuk, atau produk beku. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, terutama bagi perempuan dan generasi muda.

Selain itu, program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan juga mulai berkembang di berbagai daerah. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM agar mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, digitalisasi juga mulai dimanfaatkan, seperti pemasaran produk melalui media sosial dan platform e-commerce, yang memperluas akses pasar.

Dari sisi lingkungan, beberapa komunitas mulai mengembangkan praktik ekonomi berkelanjutan, seperti budidaya perikanan ramah lingkungan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dalam pembangunan ekonomi lokal mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya (Rahman et al., 2023).

Dengan demikian, contoh di Lampung menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi dan pembangunan manusia dapat diwujudkan melalui integrasi antara pemanfaatan potensi lokal, peningkatan kapasitas SDM, serta pengelolaan lingkungan yang bijak.

Keterkaitan antara pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan kesejahteraan menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kualitas pekerjaan dan distribusi hasil pembangunan. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi, manusia, dan lingkungan menjadi kunci utama dalam mencapai keberlanjutan. Melalui pendidikan yang berkualitas dan pembangunan ekonomi yang inklusif, SDM unggul dapat diwujudkan. Contoh di tingkat lokal menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan potensi daerah dapat menjadi solusi nyata dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

5. Di era digital dan pasca-pandemi, terjadi perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat, termasuk meningkatnya ekonomi digital, e-commerce, dan tren sustainable entrepreneurship. Namun, banyak UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala: • literasi digital rendah • keterbatasan akses pasar global • kurangnya inovasi berbasis keberlanjutan
- Sebagai lulusan S2 Pendidikan IPS, Anda diharapkan mampu mengintegrasikan nilai kewirausahaan dalam pembelajaran. Pertanyaan 1. Analisis tantangan utama UMKM Indonesia dalam menghadapi ekonomi digital dan globalisasi. 2. Rancang model pembelajaran IPS berbasis kewirausahaan (entrepreneurship education) yang mampu meningkatkan kemampuan inovasi mahasiswa/siswa. 3. Jelaskan bagaimana konsep kewirausahaan berkelanjutan (sustainable entrepreneurship) dapat diintegrasikan dalam model tersebut.

**Jawab:**

1. Transformasi menuju ekonomi digital dan globalisasi membuka peluang besar bagi UMKM di Indonesia, tetapi juga menghadirkan tantangan struktural yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital, yang menyebabkan pelaku UMKM kesulitan mengadopsi teknologi seperti e-commerce, digital marketing, dan sistem pembayaran digital. Banyak pelaku usaha masih menggunakan metode konvensional sehingga tidak mampu bersaing di pasar yang semakin berbasis teknologi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi dan infrastruktur digital juga menjadi hambatan serius. Tidak meratanya akses internet, terutama di daerah, membuat transformasi digital UMKM berjalan tidak optimal. Hal ini diperparah oleh keterbatasan modal dan akses pembiayaan, sehingga UMKM sulit berinvestasi dalam teknologi baru.

Tantangan berikutnya adalah akses pasar global yang masih terbatas. Meskipun platform digital membuka peluang ekspor, banyak UMKM belum mampu memenuhi standar internasional, baik dari sisi kualitas produk, sertifikasi, maupun manajemen bisnis. Di sisi lain, globalisasi juga meningkatkan persaingan, sehingga UMKM harus bersaing dengan produk luar negeri yang lebih kompetitif.

Selain itu, kurangnya inovasi berbasis keberlanjutan (*sustainability*) menjadi isu penting. Banyak UMKM masih berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Padahal, tren global saat ini mengarah pada *sustainable entrepreneurship*, yang menuntut bisnis tidak hanya menguntungkan tetapi juga ramah lingkungan dan berdampak sosial positif.

Secara keseluruhan, tantangan UMKM dapat dirangkum dalam tiga aspek utama: (1) keterbatasan kapasitas (literasi dan keterampilan), (2) keterbatasan sumber daya (modal dan teknologi), dan (3) tekanan eksternal (persaingan global dan tuntutan keberlanjutan). Tanpa intervensi strategis, kondisi ini dapat memperlemah daya saing UMKM dalam ekonomi digital.

2. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan model pembelajaran IPS berbasis kewirausahaan (*entrepreneurship education*) yang kontekstual, inovatif, dan berbasis pengalaman. Model yang dapat dirancang adalah Model IPS-Entrepreneurship berbasis Project & Digital Innovation (PEDI Model).

#### **a. Landasan Model**

Model ini mengintegrasikan:

- IPS (analisis sosial-ekonomi)
- Kewirausahaan (*entrepreneurial mindset*)
- Teknologi digital (*digital literacy*)

Pendekatan yang digunakan:

- *Project-Based Learning (PjBL)*
- *Problem-Based Learning (PBL)*
- *Experiential Learning*

#### **b. Sintaks (Tahapan Pembelajaran)**

- 1) Identifikasi Masalah Sosial-Ekonomi. Siswa menganalisis masalah nyata, misalnya: UMKM lokal yang belum go digital.
- 2) Eksplorasi Ide Bisnis. Siswa merancang solusi usaha berbasis digital (misalnya: bisnis online produk lokal).

### 3) Perancangan Model Bisnis

Menggunakan tools seperti:

- Business Model Canvas
- Analisis pasar digital

### 4) Implementasi Proyek (Mini Business Project)

Siswa menjalankan usaha sederhana:

- Membuat produk
- Menjual melalui media sosial/e-commerce

5) Evaluasi dan Refleksi. Menganalisis keuntungan, tantangan, dan dampak sosial.

### c. Contoh Implementasi

Misalnya dalam konteks IPS:

- Siswa membuat bisnis produk olahan lokal (keripik pisang Lampung)
- Dipasarkan melalui Instagram/TikTok Shop
- Menggunakan strategi digital marketing
- Menganalisis dampak ekonomi dan sosialnya

Melalui model ini, siswa tidak hanya memahami teori ekonomi, tetapi juga mengalami langsung proses kewirausahaan.

3. Konsep *sustainable entrepreneurship* merupakan pendekatan kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Integrasi konsep ini dalam pembelajaran sangat penting untuk membentuk wirausahawan masa depan yang bertanggung jawab.

#### a. Integrasi dalam Kurikulum

Dalam model PEDI, sustainability dapat diintegrasikan melalui:

- Pemilihan produk ramah lingkungan
- Penggunaan bahan daur ulang
- Pengurangan limbah produksi

- Model bisnis berbasis sosial

Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan dapat meningkatkan niat kewirausahaan berkelanjutan melalui pembentukan nilai dan sikap individu

### **b. Integrasi dalam Proses Pembelajaran**

Setiap tahap pembelajaran mengandung unsur sustainability:

1. Identifikasi masalah dengan isu lingkungan (sampah, limbah)
2. Ide bisnis dengan solusi berbasis green economy
3. Produksi dengan efisiensi sumber daya
4. Distribusi dengan digital (mengurangi jejak karbon)
5. Evaluasi dengan dampak sosial dan lingkungan

### **c. Contoh Nyata**

Siswa membuat usaha:

- Produk: tas dari limbah plastik
- Strategi: penjualan online
- Dampak:
  - Mengurangi sampah
  - Meningkatkan pendapatan
  - Edukasi masyarakat

Ini menunjukkan integrasi antara:

- ekonomi
- lingkungan
- sosial

### **d. Outcome yang Diharapkan**

Melalui integrasi ini, siswa memiliki:

- *entrepreneurial mindset* (kreatif, inovatif, berani risiko)

- *sustainability awareness* (peduli lingkungan & sosial)
- *digital skills* (adaptif terhadap teknologi)

UMKM Indonesia menghadapi tantangan besar dalam ekonomi digital, terutama dalam hal literasi digital, akses pasar global, dan inovasi berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan IPS perlu bertransformasi dengan mengintegrasikan kewirausahaan dan teknologi digital melalui model pembelajaran berbasis proyek. Integrasi konsep *sustainable entrepreneurship* menjadi kunci untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan ini, pendidikan IPS dapat berperan strategis dalam mencetak generasi wirausaha yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.

### Sumber Referensi:

- Adriyan, D. F., Noviyanti, S. S., Sarah, S., Weking, P. M., & Kurnia, B. (2025). Konsep pendidikan global pada pembelajaran IPS dan implikasinya terhadap ekonomi mikro dan makro. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 5(3), 2504–2509.
- Bahri, A. S., & Herliana, K. (2025). Kontribusi mata pelajaran IPS terhadap pembentukan sikap dan keterampilan kewirausahaan siswa SMP. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 10(2).
- Bukht, R., & Heeks, R. (2017). Defining, conceptualising and measuring the digital economy. *Development Informatics Working Paper*, 68.
- Efendi, D. R., Ermanita, E., & Sriwayuni, T. (2024). Kewirausahaan di era digital: Tantangan dan peluang. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 218–223.
- Fithriyani, M., Nurfalah, S., & Dewi, R. S. (2025). Analisis tantangan pembelajaran IPS dalam konsep kajian sistem ekonomi global. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 5(2).
- Hasibuan, S. M. (2023). Perilaku ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam pelajaran IPS di sekolah. *Al-Azkiya: Jurnal Pendidikan MI/SD*, 10(1).
- Heilman, M. E., & Chen, J. J. (2003). Entrepreneurship as a solution: The allure of self-employment for women and minorities. *Human Resource Management Review*, 13(2), 347–364.

- Indah, A. P. N., Nuraeni, I., & Rustini, T. (2023). Green economy dalam mengembangkan jiwa green entrepreneurship siswa sekolah dasar. *Jurnal Sadewa*, 2(1).
- International Labour Organization (ILO). (2022). *World employment and social outlook*. ILO Publishing.
- Islam, M. R., & Mehdi, A. A. (2024). Sustainable entrepreneurship and climate awareness. *Journal of Sustainable Development Research*.
- McWilliam, A. R., Wianti, N. I., & Taufik, Y. (2021). Poverty and prosperity among Sama Bajo fishing communities. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 42(1), 132–148.
- Meilisa, H. A., Kurnianti, E. M., & Hasanah, U. (2023). Penerapan pembelajaran terpadu materi aktivitas ekonomi untuk meningkatkan literasi finansial. *Jurnal Genta Mulia*, 14(2).
- Nambisan, S. (2017). Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 41(6), 1029–1055.
- Novakarti, O., & Fatoni, R. A. (2025). Behind the chain of poverty: Social and economic conflicts that oppress fishing communities. *Journal of Sumatera Sociological Indicators*.
- Obie, M. (2024). Understanding poverty among fishing communities in Indonesia. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 50(8), 649–654.
- OECD. (2022). *Bridging the gender gap in the digital economy*. OECD Publishing.
- Pramudita, R. A., et al. (2025). Edupreneurship berbasis teknologi digital pada UMKM. *Ranah Research Journal*, 7(3).
- Rahman, A., Hidayat, T., & Sari, D. (2023). Community-based economic development in coastal areas. *Journal of Sustainable Development*, 16(2), 45–58.
- Roisah, K., et al. (2023). Legal development in overcoming overfishing in Indonesian coastal areas. *Journal of Indonesian Legal Studies*.
- Septiani, A. D., et al. (2024). Peran dan tantangan UMKM dalam era digital di Indonesia. *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting*, 1(10), 1107–1118.
- Sitompul, P. S., et al. (2025). Transformasi digital UMKM Indonesia: Tantangan dan strategi adaptasi. *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*, 2(2).
- Sitorus, O. F., et al. (2024). Tantangan transformasi digital UMKM dan solusi pendampingan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*.
- Subianto, P., et al. (2023). The potential for developing a sustainable fishing sector in Sukamara. *Journal Growth*, 10(1).
- UN Women. (2021). *Women in the digital economy*. United Nations.

UNDP. (2022). *Human development report*. United Nations Development Programme.

UNESCO. (2023). *Education for sustainable development: A roadmap*. UNESCO Publishing.

World Bank. (2023). *World development report: Jobs and inequality*. World Bank Publications.